



## **PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PEMERINTAH DAERAH KOTA DAN KABUPATEN**

**Widya Lupita<sup>1</sup> Arief Rahman<sup>2</sup>**

### **Article history:**

Submitted: 26 Februari 2025

Revised: 2 Juni 2025

Accepted: 8 September 2025

### **Keywords:**

*Budget Absorption;*

*Decentralization;*

*Effectiveness PAD;*

*HDI;*

### **Kata Kunci:**

Desentralisasi;

Efektivitas PAD;

IPM;

Serapan Anggaran;

### **Koresponding:**

*Fakultas Bisnis dan*

*Ekonomika Universitas Islam*

*Indonesia, Daerah Istimewa*

*Yogyakarta, Indonesia*

*Email:*

*22919052@students.uui.ac.id*

### **Abstract**

*The government's role in improving Human Development Index (HDI) is influenced by regional financial performance in the hope of encouraging an increase in overall community welfare. The purpose of the study was to analyse the effect of local government financial performance on community welfare in city and district local governments in Central Java province in 2017-2022. Financial performance analysis is seen from the ratio of the degree of decentralisation, the effectiveness of the Pendapatan Asli Daerah (PAD), budget absorption and public welfare seen from the HDI indicator. The data analysis method used is descriptive statistics by providing a description of the related data. In addition, using panel data analysis with fixed effect models. The results show that the degree of decentralisation and budget absorption had a positive and significant effect, while the effectiveness of PAD had no effect on HDI in city and district local governments in Central Java province in 2017-2022. The implications of this research can be used as a guideline to improve the planning process and preparation of financial performance, as well as to improve the quality of local government finances, which ultimately contributes to improving the welfare of the community.*

### **Abstrak**

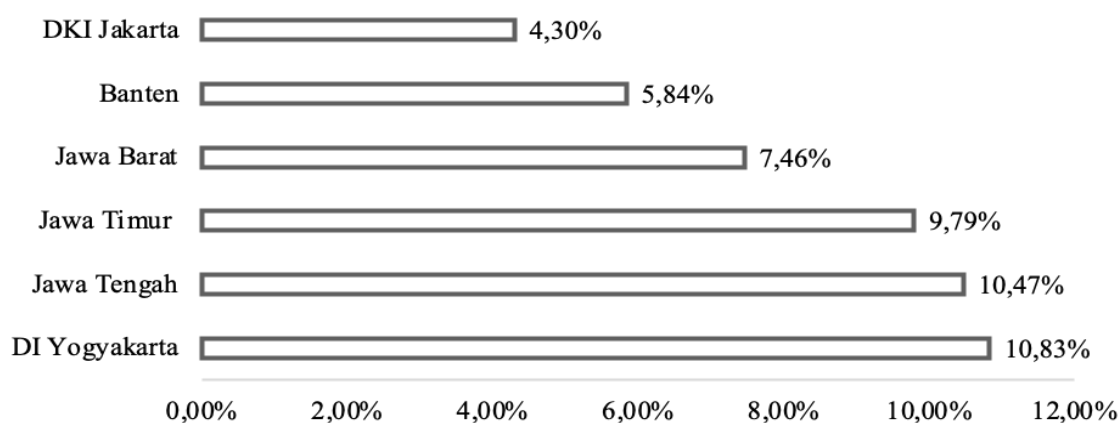
Peran pemerintah dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dipengaruhi oleh kinerja keuangan daerah dengan harapan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap kesejahteraan masyarakat pada pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2022. Analisis kinerja keuangan dilihat dari rasio derajat desentralisasi, efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), serapan anggaran dan kesejahteraan masyarakat dilihat dari indikator IPM. Metode analisis data yang digunakan yaitu statistik deskriptif dengan memberikan deskripsi mengenai data-data terkait. Selain itu, menggunakan analisis data panel dengan *fixed effect model*. Hasil penelitian menunjukkan derajat desentralisasi dan serapan anggaran berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan untuk efektivitas PAD tidak berpengaruh terhadap IPM pada pemerintah daerah kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2022. Implikasi dari penelitian ini dapat dijadikan pedoman untuk memperbaiki proses perencanaan dan penyusunan kinerja keuangan, serta untuk meningkatkan kualitas keuangan pemerintah daerah, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia<sup>2</sup>

Email: 013120101@uui.ac.id

## PENDAHULUAN

Menurut Widiyanto & Isnowati (2023) pemerintah daerah harus memenuhi tuntutan publik dengan menyediakan laporan keuangan yang secara akurat meninjau hasil aktual dibandingkan proyeksi, mengevaluasi kinerja, dan memeriksa kepatuhan terhadap peraturan. Kualitas laporan yang baik dan akurat menunjukkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah sehingga dapat mempengaruhi penilaian kinerja keuangan. Kinerja keuangan yang diukur dengan menggunakan rasio keuangan dapat membantu dalam menentukan strategi pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan efisien, serta memperbaiki kinerja ekonomi. Menurut Gian & Arif (2022) kinerja keuangan pemerintah daerah yang baik harapannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Indikator kesejahteraan masyarakat dapat dilihat seperti dari tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kemiskinan di Indonesia telah menjadi masalah nasional. Jawa Tengah telah menjadi isu nasional karena menduduki peringkat kedua dari daftar provinsi paling miskin setelah Daerah Istimewa Yogyakarta (Putri, 2024). Gambar 1 menggambarkan provinsi paling miskin di Pulau Jawa pada tahun 2024.



Sumber: (Putri, 2024)

**Gambar 1. Data Provinsi Paling Miskin di Pulau Jawa Tahun 2024**

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2024), Jawa Tengah memiliki persentasi penduduk miskin mencapai 10,47 persen pada Maret 2024. Angka tersebut terpantau turun dari 10,77 persen pada Profil Kemiskinan Indonesia periode Maret 2023. Jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah mencapai 3.704.330 orang, turun dari 3.791.500 pada Maret 2023. Hal ini sejalan dengan penelitian Sari *et al.*, (2023) yang menyatakan bahwa Provinsi Jawa Tengah termasuk wilayah dengan kemiskinan cukup tinggi pada periode tahun 2020 sebesar 11,09 persen, tertinggi kedua di Pulau Jawa. Tingkat kemiskinan dipengaruhi oleh faktor pendidikan, ekonomi, lokasi, dan IPM (Sari *et al.*, 2023). Sebuah daerah dikatakan berkembang, maju ataupun terbelakang dapat dilihat dari IPM. Selain digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator dana alokasi umum, oleh sebab itu indeks pembangunan manusia bagi Indonesia dapat dikatakan data yang strategis (Sari & Riharjo, 2020). IPM adalah indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu negara dapat mengakses hasil-hasil pembangunan di berbagai bidang, termasuk kesehatan, pendapatan, pendidikan, dan sebagainya (Ningsih & Ekaputri, 2024). BPS mencatat IPM Jawa Tengah pada tahun 2017 sebesar 70,52 persen dan terus mengalami tren kenaikan hingga tahun 2022. Seiring tren kenaikan tersebut, IPM di Provinsi Jawa Tengah ternyata tidak lebih tinggi dibandingkan IPM nasional di Indonesia.

**Tabel 1.**  
**Daftar IPM Jawa Tengah dan IPM Nasional Tahun 2017-2022**

| Tahun | IPM Jawa Tengah | IPM Nasional |
|-------|-----------------|--------------|
| 2017  | 70,52           | 70,81        |
| 2018  | 71,12           | 71,39        |
| 2019  | 71,73           | 71,92        |
| 2020  | 71,78           | 71,94        |
| 2021  | 72,16           | 72,29        |
| 2022  | 72,79           | 72,91        |

Sumber: BPS, 2024

IPM juga diartikan sebagai indikator strategis yang sering digunakan untuk melihat upaya dan hasil program pembangunan di suatu daerah secara keseluruhan (Rindiyani & Mubaraq, 2023). IPM mempunyai tiga aspek dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak (BPS, 2024). Hasil penelitian Hamimah & Zulkarnain (2020) menunjukkan bahwa secara parsial rasio derajat desentralisasi fiskal dan rasio efektivitas PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Sedangkan rasio belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Periode pengamatan tersebut berlangsung tahun 2014-2018, sehingga perlu adanya pembaharuan penelitian saat pandemi bahkan setelah pandemi covid-19. Selang dua tahun, terdapat penelitian Sahlan *et al.*, (2022) yang menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap IPM. Penelitian ini berada di Kabupaten Bima, sehingga untuk penelitian berikutnya diperlukan populasi yang lebih luas dengan variabel kinerja keuangannya yang lainnya. Pada tahun yang sama, terdapat penelitian Rahma *et al.*, (2022) yang menunjukkan hasil penelitian bahwa kemandirian fiskal, efektivitas pendapatan asli daerah, keserasian belanja dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap IPM. Penelitian dilakukan di pemerintah daerah Kabupaten Bombana tahun 2004 sampai dengan tahun 2013 sehingga perlu dilakukan penelitian dengan perkembangan tahun terbaru dengan populasi yang lebih luas.

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dilihat bahwa IPM merupakan tolak ukur yang dapat digunakan dalam menilai kinerja pemerintah daerah. Selain itu, diperlukan penelitian dengan perkembangan tahun terbaru dan populasi yang dapat merepresentasikan dari masalah yang ada. Dengan demikian, peneliti mengangkat topik penelitian mengenai pengaruh kinerja keuangan terhadap kesejahteraan masyarakat. Kinerja keuangan ini diukur dengan rasio derajat desentralisasi, efektivitas pendapatan asli daerah, dan serapan dana, sedangkan yang menjadi indikator kesejahteraan masyarakat ialah IPM. Peneliti mengangkat tema penelitian pada tahun 2017-2022. Pemilihan tahun penelitian didasarkan pada tahun terkini yang paling memungkinkan terkait ketersediaan data dan kondisi yang paling merepresentasikan pada keadaan saat ini. Selain itu, peneliti mengambil populasi dengan kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah dengan permasalahan adanya kemiskinan yang menyebabkan terhambatnya pembangunan manusia. Hal itu juga tercermin bahwa IPM yang dicapai oleh Provinsi Jawa Tengah masih di bawah IPM Nasional Indonesia.

Landasan teori yang digunakan ialah Teori Keuangan Publik dan Teori *Stewardship*. Keuangan publik tidak hanya mencerminkan upaya pemerintah dalam mengumpulkan sumber dana, tetapi juga bagaimana dana tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas (Ghazali, 2023). Sedangkan Teori *Stewardship* menjelaskan situasi di mana pemerintah beroperasi untuk mencapai tujuan dan kepentingan organisasi, tanpa didorong oleh kepentingan pribadi. Dalam konteks ini, pemerintah desa yang diwakili oleh kepala desa berfungsi sebagai pelayan, sementara masyarakat dianggap sebagai pemilik sumber daya (Fitriani *et al.*, 2021).

Keterkaitan Teori Keuangan Publik pada penelitian ini dapat dilihat melalui kinerja keuangan suatu negara atau daerah yang menunjukkan seberapa baik pemerintah mengelola sumber daya. Teori Keuangan Publik menekankan bahwa pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien adalah penting

untuk mendanai berbagai program pembangunan, termasuk yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat (IPM). Selain itu, Teori Keuangan Publik membahas bagaimana sumber daya didistribusikan ke berbagai sektor publik. Jika dilihat dari Teori *Stewardship*, maka keterkaitan pada penelitian ini adalah untuk berkontribusi pada peningkatan IPM dengan mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat, pemimpin yang berfungsi sebagai *steward* akan berkomitmen untuk meningkatkan kinerja keuangan sambil mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat. Teori *Stewardship* mendukung pendekatan berkelanjutan dalam pengelolaan kinerja organisasi, di mana kinerja keuangan dan tanggung jawab sosial berjalan beriringan. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, di mana IPM menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan.

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat disimpulkan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H<sub>1</sub>: Derajat desentralisasi berpengaruh positif terhadap IPM pada pemerintah daerah kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2022

H<sub>2</sub>: Efektivitas pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap IPM pada pemerintah daerah kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2022

H<sub>3</sub>: Serapan anggaran berpengaruh positif terhadap IPM pada pemerintah daerah kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2022

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dan analisis regresi data panel. Sampel dalam penelitian ini adalah setiap pemerintah daerah kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2017-2022. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik sampel jenuh, di mana seluruh anggota populasi diikutsertakan sebagai sampel. Sumber data dalam penelitian terdiri dari sumber data sekunder. Variabel independen yang digunakan ialah derajat desentralisasi yang dihitung dengan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan total penerimaan daerah. Selanjutnya, efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan). Sementara serapan dana, dihitung dengan cara membandingkan realisasi belanja dibagi pagu anggaran belanja, sedangkan yang menjadi variabel dependen ialah IPM. Menurut Azfirmawarman *et al.*, (2023) tiga aspek utama untuk mengukur IPM mencakup kualitas kesehatan, kualitas pendidikan, dan standar hidup yang memadai. Peningkatan IPM di Indonesia berkontribusi terhadap perbaikan kualitas sumber daya manusia di setiap wilayah (Wardhana *et al.*, 2022). Pengumpulan data diperoleh dari laman website pemerintah daerah kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dan BPS. Analisa data yang digunakan pada penelitian ini masing-masing, yaitu statistik deskriptif dan analisis regresi data panel dengan software *e-views*. Statistik deskriptif memberikan informasi tentang ciri-ciri variabel-variabel dalam penelitian, yang meliputi jumlah pengamatan, nilai terendah, nilai tertinggi, rata-rata, dan standar deviasi. Pengukuran nilai sentral dari distribusi data dapat dilakukan dengan menggunakan rata-rata, sementara standar deviasi menunjukkan seberapa besar variasi nilai data dibandingkan dengan rata-rata tersebut (Ariani & Utama, 2024). Data panel merupakan kombinasi data *cross section* dan *time series*. Analisis regresi data panel pada penelitian ini, tidak dilakukan pengujian asumsi klasik. Hal ini disebabkan bahwa data panel memungkinkan peneliti untuk menganalisis perilaku yang lebih kompleks dalam model, sehingga pengujian data panel tidak memerlukan uji asumsi klasik (Khikmah *et al.*, 2020). Berikut rumus dari model regresi panel:

$$Y = \alpha + b_1X_{1it} + b_2X_{2it} + b_3X_{3it} + e \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

Y = Variabel dependen (IPM)

$\alpha$  = Konstanta

$X_1$  = Variabel independen 1 (derajat desentralisasi)

$X_2$  = Variabel independen 2 (efektivitas PAD)

$X_3$  = Variabel independen 3 (serapan dana)

$b_{(1,2,3)}$  = Koefisien regresi masing-masing variabel independen

e = Error term

t = Waktu

i = Pemerintahan kabupaten/kota

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh hasil uji statistik deskriptif untuk masing-masing variabel pada Kota dan Kabupaten di Jawa Tengah tahun 2017-2022 sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2. Tabel 2 adalah tabel yang mencantumkan hasil uji statistik deskriptif.

**Tabel 2.**  
**Hasil Uji Statistik Deskriptif**

| Variabel               | N   | Minimum | Maximum | Mean   | Std. Deviation |
|------------------------|-----|---------|---------|--------|----------------|
| Derajat Desentralisasi | 210 | 0,1     | 0,51    | 0,19   | 0,07           |
| Efektivitas PAD        | 210 | 0,81    | 1,44    | 10,783 | 0,114          |
| Serapan Anggaran       | 210 | 0,75    | 0,96    | 0,903  | 0,040          |
| IPM                    | 210 | 0,65    | 0,84    | 0,724  | 0,045          |
| Valid N (listwise)     | 210 |         |         |        |                |

Sumber: Data Diolah, 2024

Dilihat dari hasil analisis Tabel 2, maka kesimpulannya adalah derajat desentralisasi kota dan kabupaten di Jawa Tengah tahun 2017-2022 memiliki nilai terendah 0,1 atau setara dengan 10 persen berada pada Kabupaten Blora tahun 2018 dengan kriteria Sangat Rendah. Sedangkan nilai terbesarnya sebesar 0,51 atau setara 51 persen yang berada pada Kota Semarang tahun 2022 dengan kriteria Sangat Tinggi. Nilai rata-rata derajat desentralisasi sebesar 0,19 atau setara dengan 19 persen dengan kriteria rendah. Ini menunjukkan adanya potensi terbatasnya kemampuan keuangan daerah untuk mendanai berbagai aktivitasnya. Hal ini dapat berakibat mulai dari terhambatnya pembangunan daerah hingga keterbatasan pada pelayanan publik. Pemerintah penting untuk mengelola keuangan secara efektif dan efisien yang diharapkan mampu untuk membiayai serta mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Standar devisiasi sebesar 0,0716 atau setara dengan 7,16 persen. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa nilai standar devisiasi lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata, hal itu menunjukkan bahwa variabel derajat desentralisasi memiliki data yang tidak bervariasi.

Efektivitas pendapatan asli daerah kota dan kabupaten di Jawa Tengah tahun 2017-2022 memiliki nilai terendah 0,81 atau setara dengan 81 persen kriteria kurang efektif berada pada Kabupaten Pekalongan tahun 2022, sedangkan nilai terbesarnya sebesar 1,44 atau setara 144 persen berada pada Kabupaten Purworejo tahun 2021 dengan kriteria sangat efektif. Nilai rata-rata efektivitas PAD sebesar 107,83 atau setara dengan 107,83 persen dengan kriteria sangat efektif. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kemampuan yang baik dalam merealisasikan PAD

dilihat dari apa yang sudah direncanakan terhadap target berdasarkan potensi nyata di daerah tersebut, PAD yang efektif dirasa dapat memberikan manfaat terhadap masyarakat luas seperti meratanya pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas dari layanan publik, dan stabilitas keuangan. PAD yang efektif diharapkan mampu mencapai pembangunan berkelanjutan hingga mencapai kesejahteraan masyarakat. Standar devisiasi sebesar 0,11423 atau setara dengan 11,423 persen. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa nilai standar deviasi lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata, hal itu menunjukkan bahwa variabel efektivitas PAD memiliki data yang tidak bervariasi.

Serapan anggaran kota dan kabupaten di Jawa Tengah tahun 2017-2022 memiliki nilai terendah 0,75 atau setara dengan 75 persen berada pada Kota Salatiga tahun 2017, sedangkan nilai terbesarnya sebesar 0,96 atau setara 96 persen berada pada Kabupaten Banjarnegara tahun 2020. Nilai rata-rata serapan anggaran sebesar 0,9027 atau setara dengan 90,27 persen. Hal ini merepresentasikan pencapaian pada penggunaan dana yang telah dialokasikan untuk membiayai kegiatan tertentu. Serapan dana tersebut menunjukkan bahwa dana tersebut digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan tertentu yang harapannya dapat membuat kesejahteraan masyarakat meningkat. Serapan dana yang tinggi juga penting untuk dilakukan penilaian yang berkaitan dengan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam penggunaan dananya. Selain itu, serapan dana yang tinggi dan tidak melebihi 100 persen dianggap tidak adanya pemborosan anggaran. Standar deviasi sebesar 0,03985 atau setara dengan 3,985 persen. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa nilai standar deviasi lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata, hal itu menunjukkan bahwa variabel serapan anggaran memiliki data yang tidak bervariasi.

IPM Kota dan Kabupaten di Jawa Tengah tahun 2017-2022 memiliki nilai terendah 0,65 atau setara dengan 65 persen berada pada Kabupaten Brebes tahun 2017 dengan kriteria Sedang, sedangkan nilai terbesarnya sebesar 0,84 atau setara 84 persen berada pada Kota Salatiga tahun 2022 dengan kriteria sangat tinggi. Nilai rata-rata IPM sebesar 0,7237 atau setara dengan 72,37 persen. IPM yang tinggi diharapkan memiliki kualitas hidup yang lebih baik yang terbentuk dari angka harapan hidup, pengetahuan, dan standar hidup yang layak. Hal tersebut akan menjadikan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai yang pada akhirnya akan membuat pembangunan secara berkelanjutan. Standar deviasi sebesar 0,04467 atau setara dengan 4,467 persen. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa nilai standar devisiasi lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata, hal itu menunjukkan bahwa variabel IPM memiliki data yang tidak bervariasi.

Setelah itu, dilakukan uji analisis regresi data panel yang bertujuan untuk menyelidiki lebih lanjut hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Estimasi model regresi dapat dilakukan dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu *common effect model*, *fixed effect model*, *random effect model*. Untuk menentukan model mana yang akan digunakan, peneliti melakukan pengujian dengan melakukan seperti Uji Chow, Uji Hausman, Uji Lagrange *Multiplier*.

Berdasarkan uji *chow model* yang dipilih adalah *fixed effect model* dan berdasarkan uji *hausman model* yang dipilih adalah *fixed effect model* sehingga ditetapkan model yang terbaik adalah *fixed effect model* dan tidak perlu melakukan uji *lagrange multiplier (LM Test)*. Model yang terbaik adalah *fixed effect model*. Hasil dan pembahasan pengujian hipotesis dengan menggunakan *fixed effect* dicantumkan pada Tabel 3.

Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian adalah derajat desentralisasi berpengaruh berpengaruh positif terhadap IPM pada pemerintah daerah kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2022. Hasil pengujian menunjukkan bahwa derajat desentralisasi berpengaruh signifikan terhadap IPM dikarenakan nilai prob. sebesar  $0,0000 < 0,05$ . Koefisien regresi sebesar 0,131318 sehingga derajat desentralisasi berpengaruh secara positif terhadap IPM. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa derajat desentralisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM pada pemerintah daerah kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2022. Hal tersebut berarti bahwa derajat desentralisasi merupakan bagian penting dalam pemerinthan kaitannya dengan IPM.

Derajat desentralisasi ini merujuk pada sejauh mana pemerintah daerah turut serta dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, dapat membuat layanan publik meningkat karna adanya pengelolaan sumber daya yang optimal. Hal ini sejalan dengan penelitian Winarni *et al.* (2022); Gian & Arif (2022); Astuti & Mispiyanti (2020).

**Tabel 3.**  
**Hasil Fixed Effect Model**

| <i>Variable</i>        | <i>Coefficient</i> | <i>Std. Error</i> | <i>t-Statistic</i> | <i>Prob.</i> |
|------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| C                      | 0,643              | 0,021             | 29,929             | 0,000        |
| Derajat Desentralisasi | 0,131              | 0,028             | 4,755              | 0,000        |
| Efektivitas PAD        | 0,005              | 0,006             | 0,836              | 0,404        |
| Serapan Anggaran       | 0,055              | 0,022             | 2,462              | 0,015        |

*Sumber:* Data diolah, 2024

Hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah efektivitas PAD berpengaruh berpengaruh positif terhadap IPM pada pemerintah daerah kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2022. Hasil pengujian menunjukkan bahwa efektivitas PAD tidak berpengaruh terhadap IPM dikarenakan nilai prob. sebesar  $0,4042 > 0,05$ . Koefisien regresi sebesar 0,004967 sehingga efektivitas PAD tidak berpengaruh secara positif terhadap IPM. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas PAD tidak berpengaruh secara positif terhadap IPM pada pemerintah daerah kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2022. Hal ini berarti antara efektivitas PAD dengan IPM tidak ditemukan hubungan atau pengaruh yang signifikan. Hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa kemungkinan-kemungkinan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Habbe (2021) yang menyatakan bahwa efektivitas PAD gagal meningkatkan IPM dan menurunkan kemiskinan. Begitu pula penelitian Astuti & Mispiyanti (2020) yang menyatakan bahwa efektivitas PAD tidak berpengaruh terhadap IPM. Akan tetapi, temuan ini tidak sejalan dengan temuan Zein & Septiani (2024) yang menyatakan bahwa kinerja keuangan yang diukur dengan rasio efektivitas berpengaruh dan tidak signifikan terhadap IPM. Siregar (2023) menyatakan bahwa efektivitas PAD berpengaruh signifikan terhadap IPM, dan Khairudin *et al.* (2020) menyatakan bahwa efektivitas keuangan daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini adalah serapan anggaran berpengaruh berpengaruh positif terhadap IPM pada pemerintah daerah kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017-2022. Hasil pengujian menunjukkan bahwa serapan anggaran berpengaruh signifikan terhadap IPM dikarenakan nilai prob. sebesar  $0,0148 < 0,05$ . Koefisien regresi sebesar 0,055231 sehingga serapan anggaran berpengaruh secara positif terhadap IPM. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa serapan anggaran berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap IPM pada pemerintah daerah kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2022. Hasil ini sejalan dengan penelitian Rahim *et al.* (2023) yang menyatakan bahwa belanja pendidikan dan belanja kesehatan berpengaruh signifikan terhadap IPM. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Sutono (2022) yang menyatakan bahwa penyerapan belanja pemerintah daerah tidak memiliki pengaruh signifikan pada IPM, sedangkan penyerapan belanja pemerintah pusat berpengaruh signifikan pada IPM.

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, penelitian ini menunjukkan bahwa derajat desentralisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM pada pemerintah daerah kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2022. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat desentralisasi yang tinggi memberikan pemerintah daerah lebih banyak kebebasan dalam pengambilan

keputusan. Akibatnya, pemerintah daerah dapat melaksanakan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tingkat desentralisasi yang tinggi juga membantu pemerintah dalam mengalokasikan anggaran secara efektif, yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Program pembangunan yang berfokus pada masyarakat dapat memberikan dampak positif terhadap IPM. Berdasarkan Teori Keuangan Publik, dapat dilihat bahwa pada derajat desentralisasi dapat memberikan keleluasaan pada daerah otonom yang membuat pemerintah daerah tanggap dalam merespons kebutuhan masyarakat sekitar. Jika kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik maka kualitas layanan publik akan meningkat hingga sehingga berkontribusi dalam peningkatan IPM. Sejalan dengan Teori Keuangan Publik, Teori *Stewardship* juga menekankan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Desentralisasi dapat membuat pemerintah daerah mengambil keputusan lebih bijak karena pemerintah daerah langsung mengetahui akan kondisi masyarakat di daerah. Adanya kolaborasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat membuat proses pembangunan menjadi efektif. Adanya proses pembangunan yang efektif akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan IPM akan terus meningkat.

Hasil analisis data selanjutnya menunjukkan bahwa efektivitas PAD tidak berpengaruh terhadap IPM pada pemerintah daerah kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2022. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengevaluasi alokasi dan pemanfaatan sumber daya yang ada. Berbagai alternatif perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan IPM. Selain itu, pemerintah daerah harus menetapkan prioritas program yang berorientasi pada aspek-aspek yang dapat mendorong IPM, seperti pendidikan dan kesehatan. Dalam merancang program pembangunan daerah, kolaborasi dengan masyarakat sangat penting agar program yang dibuat dapat memenuhi kebutuhan mereka. Secara teori keuangan publik, jika pendapatan asli daerah tidak dikelola dengan baik, dapat menyebabkan anggaran tidak terdistribusi dengan merata. Pembangunan yang ada kemungkinan kurang tepat sarannya. Kualitas pelayanan publik dirasa menjadi kurang efisien. Akibatnya, program-program yang telah direncanakan kurang memberikan manfaat yang pada akhirnya gagal menaikkan IPM. Sedangkan menurut Teori *Stewardship* ada kemungkinan bahwa masyarakat kurang memiliki kepercayaan kepada pemerintah daerah sebagai *steward*. Pemerintah daerah ada kemungkinan kurang optimal dalam mengelola sumber daya yang ada sehingga pelayanan publik belum maksimal. Akibatnya, kesejahteraan masyarakat belum dapat tercapai dengan baik. Hal tersebut membuat efektivitas PAD tidak berpengaruh secara positif terhadap IPM.

Terakhir, analisis data pada penelitian ini menunjukkan serapan anggaran berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap IPM pada pemerintah daerah kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2022. Pemerintah harus merencanakan dan memastikan alokasi anggaran dengan tepat agar serapan anggaran tersebut dapat optimal. Ini berimplikasi bahwa peningkatan serapan anggaran dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan publik, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan. Teori Keuangan Publik dalam kaitannya serapan anggaran menjelaskan bahwa anggaran dana yang efektif dan efisien dapat dialokasikan secara tepat dan berkontribusi untuk pembangunan masyarakat. Jika anggaran terserap dengan baik, maka kualitas pelayanan publik dapat meningkat, hal tersebut akan berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Menurut teori *stewardship*, anggaran dana yang dikelola pemerintah secara efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat dapat mendukung program-program pembangunan berkelanjutan. Pemerintah harus selalu mengawal anggaran dan belanja supaya digunakan untuk kepentingan masyarakat dengan tepat guna dan sasaran. Sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat melalui IPM.

## SIMPULAN DAN SARAN



Kesimpulan dari penelitian ini adalah derajat desentralisasi berpengaruh secara positif dan signifikan, efektivitas PAD tidak berpengaruh, serapan anggaran berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap IPM terhadap IPM pada pemerintah daerah kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2022. Penelitian membuktikan bahwa derajat desentralisasi dan serapan anggaran menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan untuk meningkatkan indikator IPM maka pemerintah diharapkan mengoptimalkan langkah strategis dalam membuat manajemen keuangan. Hal ini akan menjadi kontribusi yang efektif dan efisien dalam operasionalisasi.

Derajat desentralisasi dan manajemen serapan anggaran merupakan dua faktor kunci dalam meningkatkan IPM. Desentralisasi memberikan kekuatan dan fleksibilitas kepada pemerintah daerah untuk merespon kebutuhan lokal, sementara serapan anggaran yang efektif memastikan bahwa investasi dalam pembangunan manusia dilakukan dengan optimal. Secara teori keuangan public, desentralisasi memberikan kerangka kerja yang berguna untuk memahami dan menganalisis implikasi dari derajat desentralisasi, baik di dalam konteks pengelolaan keuangan daerah maupun dalam kaitannya dengan efisiensi, akuntabilitas, dan pembangunan daerah. Sedangkan serapan anggaran yang tinggi dapat menunjukkan bahwa pemerintah mampu menggunakan anggaran dengan efektif, sedangkan serapan yang rendah dapat menunjukkan ineffisiensi dalam pengeluaran. Jika dilihat dengan teori *stewardship*, derajat desentralisasi dapat memperkuat prinsip-prinsip dengan memberikan otonomi, meningkatkan kepercayaan, serta membangun motivasi dan komitmen. Pada konteks serapan anggaran pemerintahan, pejabat publik dianggap sebagai *steward* yang bertugas untuk mengelola anggaran dan sumber daya dengan cara yang memperhatikan kepentingan masyarakat. Sehingga penting bagi pemerintah untuk merencanakan dan mengelola anggaran dengan baik. Kombinasi dari keduanya dapat menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam kualitas hidup masyarakat dan pada akhirnya akan meningkatkan IPM.

## REFERENSI

- Ariani, N. M. P., & Utama, M. S. (2024). Analisis pengaruh sektor pariwisata dan PDRB terhadap PAD kabupaten/kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 13(03), 531. <https://doi.org/10.24843/EEB.2024.v13.i03.p10>
- Astuti, S., & Mispiyanti. (2020). Effects of regional government financial performance on economic growth, unemployment, poverty, and Human Development Index. *Jurnal RAK (Riset Akuntansi Keuangan)*, 5(1), 1–17. <https://doi.org/10.31002/rak.v5i1.2714>
- Azfirmawarman, D., Magriast, L., & Yulhendri. (2023). Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia (Kajian Perubahan Metodologi Penghitungan). *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 5(5), 117–125. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i5.22864>
- Basuki, A. T. (2021). Analisis data panel dalam penelitian ekonomi dan bisnis (dilengkapi dengan penggunaan Eviews). In *PT Rajagrafindo Persada*.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2024). *Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah Maret 2024*. <https://jateng.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/1523/kemiskinan-provinsi-jawa--tengah-maret-2024.html>
- BPS. (2024). *Badan Pusat Statistik Jawa Tengah*. <https://jateng.bps.go.id/>
- Fitriani, S., Pratama, A., & Putri, E. (2021). Akuntabilitas pengelolaan dana desa berdasarkan Teori Stewardship. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 8(2), 45–58. [https://www.researchgate.net/publication/356782420\\_PENGARUH\\_TRANSPARANSI\\_DAN\\_AKUNTABILITAS\\_TERHADAP\\_PENGLOLAAN\\_KEUANGAN\\_DESA\\_Studi\\_pada\\_Pemerintah\\_Desa\\_di\\_Kabupaten\\_Garut](https://www.researchgate.net/publication/356782420_PENGARUH_TRANSPARANSI_DAN_AKUNTABILITAS_TERHADAP_PENGLOLAAN_KEUANGAN_DESA_Studi_pada_Pemerintah_Desa_di_Kabupaten_Garut)
- Ghazali, R. (2023). Menyoal pengelolaan keuangan publik dalam penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. *Ilmu dan Budaya*, 44(2), 73–95. <https://doi.org/10.47313/jidb.v44i2.2667>
- Gian, R. W., & Arif. (2022). Analisis kinerja keuangan daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi Perjuangan*, 3(2), 88–100. <https://doi.org/10.36423/jumper.v3i2.902>
- Habbe, A. H. (2021). The exploration of effect of financial performance to the public welfare. *International Journal of Law and Management*, 63(5), 464–478. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-09-2017-0222>

- Hamimah, & Zulkarnain. (2020). Pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap IPM Kabupaten/Kota di Jawa Barat. *Riset, Ekonomi, Akuntansi dan Perpajakan (Rekan)*, 1(2), 11–18. <https://doi.org/10.30812/rekan.v1i2.922>
- Khairudin, Aminah, & Redaputri, A. P. (2020). Pentingnya kinerja keuangan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. *Akuntabel*, 17(1), 148–151. <https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/AKUNTABEL/article/view/7336%0A>
- Khikmah, Z., Sarfiah, S. N., & Prasetyanto, P. K. (2020). Pengaruh kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan belanja modal terhadap IPM di Pulau Sulawesi tahun 2011-2018. *Directory Journal of Economic*, 2(4), 1127–1142. <https://doi.org/https://doi.org/10.31002/dinamic.v2i4.1449>
- Ningsih, S. A., & Ekaputri, R. A. (2024). Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, prevalensi stunting, tingkat pengangguran terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Negara Asia Tenggara. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 13(12), 2472–2482. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/EEB.2024.v13.i12.p03>
- Putri, D. L. (2024, July 4). Daftar provinsi paling miskin di Pulau Jawa 2024. *Kompas.Com*. <https://www.kompas.com/tren/read/2024/07/04/133000765/daftar-provinsi-paling-miskin-di-jawa-2024-diy-urutan-teratas?page=all#:~:text=Provinsi paling miskin kedua di,di Indonesia periode Maret 2023.>
- Rahim, M., Suriadi, L. O., Muthalib, A. A., Alwi, S., & Saenong, Z. (2023). Dampak Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Tenggara. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan*, 8(2), 205–215. <https://doi.org/https://journal.uho.ac.id/index.php/jpep>
- Rahma, F., Yunarsi, Wilda, & Dewi Yulianti. (2022). Pengaruh kinerja keuangan dan pertumbuhan ekonomi terhadap kinerja Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 1(2), 13–19. <https://doi.org/10.57151/jeko.v1i2.9>
- Rindiyani, & Mubaraq, A. (2023). Analisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat. *Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ekonomi Islam*, 1, 491–500. <https://feb.untan.ac.id/wp-content/uploads/2023/11/60.pdf>
- Sahlan, E., Yusuf, Y., & Susanto, D. (2022). Pengaruh Pendataan Asli Daerah (PAD) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi*, 4(1), 18–22. <https://doi.org/10.58258/jihad.v4i1.4592>
- Sari, D. T., Khusna, N. I., & Wulandari, F. (2023). Analisis tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah: Suatu kajian berdasarkan faktor pendidikan, sosial, ekonomi, lokasi dan Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Indonesia*, 8(1), 37. <https://doi.org/10.26737/jpipsi.v8i1.3978>
- Sari, F. N. G., & Riharjo, I. B. (2020). Pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(8). <https://doi.org/https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3630>
- Sari, D. T., Khusna, N. I., & Wulandari, F. (2023). Analisis tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah: Suatu kajian berdasarkan faktor pendidikan, sosial, ekonomi, lokasi dan Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Indonesia*, 8(1), 37–50.
- Siregar, H. A. (2023). Aspek kinerja keuangan daerah yang berdampak pada pembangunan manusia di daerah pemekaran. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*, 13(2), 157–167. <https://doi.org/10.37859/jae.v13i2.5530>
- Sutono, I. A. (2022). Pengaruh belanja pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 3(2), 150–168. <https://doi.org/10.33105/jmp.v3i2.463>
- Wardhana, A., Kharisma, B., & Risti, S. (2022). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Wilayah Indonesia Timur. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 11(12), 1480–1488. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/EEB.2022.v11.i12.p04>
- Widiyanto, P. P., & Isnawati, S. (2023). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah sebelum dan saat pandemi. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 6(2), 239–249. <https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/seiko/article/view/5>
- Winarni, E., Handayani, R., & Soleh, A. (2022). Analisis hubungan kinerja keuangan daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains)*, 7(1), 270. <https://doi.org/10.33087/jmas.v7i1.369>
- Zein, M. H. M., & Septiani, S. (2024). The effect of financial performance on capital expenditure, economic growth, Human Development Index, and poverty. *General Management*, 25(200), 188–202. <https://doi.org/10.47750/QAS/25.200.20>